



LAPORAN AKTUALISASI

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2020 BERBASIS RISIKO AUDIT INSPEKTORAT DUA

Disusun Oleh:

Nama : Fitriyani Lestari, S.E.
NIP : 199204072019032002
Instansi : Setjen dan BK DPR RI

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum	9
BAB II.....	10
PROFIL ORGANISASI.....	10
A. Visi Misi Unit Kerja Esalon II	10
B. Struktur Organisasi	11
Tabel 1. Struktur Organisasi.....	11
C. Penjelasan Tugas dan Fungsi.....	12
BAB III.....	15
RANCANGAN AKTUALISASI	15
A. Identifikasi Isu	15
B. Pemilihan Isu Prioritas	19
Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG.....	19
C. Gagasan Pemecahan Isu.....	19
D. Rancangan Aktualisasi.....	20
Tabel 3. Rencana Kegiatan Aktualisasi	21
BAB IV	32
PELAKSANAAN AKTUALISASI	32
A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi	32
Gambar 1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan	33
Gambar 2. Rapat Koordinasi Inspektorat II	35
Gambar 3. Analisis Peta Risiko	37
Gambar 4. Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan kepegawaian	39
Gambar 5. Aplikasi SIRUP	40

Gambar 6. Berkoordinasi dengan TU Inspektorat Utama dan Perencanaan & Keuangan	41
Gambar 7. Peringkat Peta Risiko	42
Gambar 8. Scoring Dokumen SPIP.....	43
Gambar 9. <i>Timetable/Schedule</i> dan Penyusunan Staff Audit	44
Gambar 10. Diskusi dengan Mentor dan para Auditor untuk menyusun Schedule Audit dan Pesonel Audit	44
Gambar 11. PKPT 2020 Berbasis Risiko Inspektorat II.....	45
Gambar 12. Melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko dengan Auditor Madya	47
Gambar 13. Sosialisasi hasil akhir PKPT 2020 Berbasis Risiko	48
E. Stakeholder.....	48
F. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala	48
G. Analisis Dampak	49
H. Jadwal Kegiatan.....	53
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	53
BAB V	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
LAMPIRAN	57
1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Kepada Pak Utama	57
2. Surat Undangan Rapat Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	57
3. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	58
4. Laporan Singkat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	58
5. Foto Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	59
6. Nota Dinas atau Surat Permohonan Permintaan Data	59

7. Dokumentasi Proses Permintaan Data Kepada TU ITTAMA dan Bagian Perencanaan dan Keuangan	60
8. Dokumentasi Permintaan Data melalui Email dengan Bagian Keuangan 60	
9. Dokumentasi Output Berupa PKPT 2020 Berbasis Risiko	61
10. Dokumentasi Kegiatan dengan Mentor dan Diskusi dengan Auditor Inspektorat II	61
11. Kegiatan Reviu PKPT 2020 Berbasis Risiko oleh Atasan Langsung	62
12. Kegiatan Sosialisasi Hasil Final PKPT 2020 Berbasis Risiko	62
13. Surat undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi Hasil Aktualisasi	63
14. Kegiatan Coaching	64
15. Dokumentasi Kartu Kendali Bimbingan	64
16. Dokumentasi Data Anggaran.....	66
17. Dokumentasi Data TLHP	68
18. Dokumentasi Data Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Aplikasi SIRUP	69



LEMBAR PERSETUJUAN AKTUALISASI

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2020 BERBASIS RISIKO AUDIT INSPEKTORAT DUA

Disusun Oleh:

Nama : Fitriyani Lestari, S.E.
NIP : 199204072019032002
Instansi : Setjend dan BK DPR RI

Peserta Diklat,

Fitriyani Lestari, S.E.
NIP.199204072019032002

Menyetujui

Mentor,

Margaretha Susanti, S.E.
NIP.198203102003122002

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
NIP.196804011998032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT,

Penyusunan laporan yang berjudul "Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Yang Berbasis Risiko Audit" ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M. selaku Inspektur Utama
2. Ibu Margaretha Susanti, S.E., selaku mentor
3. Ibu Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. selaku coach
4. Seluruh Senior dan Rekan Sejawat yang ada di Inspektorat II yang telah mendukung pembuatan rancangan aktualisasi.

Dalam penyusunannya Rancangan aktualisasi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, dikarenakan keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran sangat membantu dalam memperbaiki dan penyempurnaan rancangan aktualisasi ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya.

Bogor, 10 Oktober 2019

Penulis

Fitriyani Lestari, S.E.

NIP: 199204072019032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PNS memiliki peranan untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan.

Untuk mewujudkan karakter PNS yang kuat dan professional diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitiasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatut dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.

Berdasarkan hal tersebut PNS dituntut untuk dapat membuat proyek aktualisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Dalam hal ini penulis yang saat ini sedang menempati jabatan CPNS di Inspektorat II sebagai Auditor Ahli Pertama berinisiatif untuk melakukan inovasi pada unit kerja terkait demi menciptakan peningkatan kualitas kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintahan menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas APIP dengan IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 pada tahun 2019 harus direspon positif dan dijadikan momentum untuk meningkatkan kapasitas SDM Auditor dan melengkapi instrumen regulasi yang menjadi prasyarat peningkatan level IACM tersebut.

Berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI per tanggal 22 Desember 2017, diketahui bahwa, capaian kapabilitas APIP hasil penilaian mandiri pada tahun 2017 adalah masih di level 2. Oleh karena itu untuk mencapai Inspektorat level 3, salah satu rencana tindak (*Action Plan*) yang diperlukan untuk memenuhi Infrastruktur level 3 adalah dengan cara menyusun peta auditan berbasis risiko dan menyempurnakan PKPT berbasis Prioritas Management menjadi PKPT Berbasis Risiko.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja Pejabat Fungsional Auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Aparat pengawasan intern harus menyusun perencanaan tahunan sebelum melaksanakan tugas-tugasnya. Perencanaan tahunan disusun berbasis risiko untuk

menentukan prioritas kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area-area organisasi yang memiliki paparan risiko terbesar. Untuk itu, Inspektur harus memahami proses tujuan organisasi dan proses manajemen risiko organisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. Visi Misi Unit Kerja Esalon II

a. VISI :

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, Akuntabel, dan Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

b. MISI :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional dan Kompeten.

B. Struktur Organisasi

Tabel 1. Struktur Organisasi



update per tanggal 3 Oktober 2019

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung telah diatur keberadaanya dalam Pasal 294 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang Administrasi dan Persidangan dan dalam melaksanakan wewenang tugasnya Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki susunan organisasi, diantaranya yaitu Inspektur Utama.

C. Penjelasan Tugas dan Fungsi

Dalam pasal 257 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI disebutkan bahwa "Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Badan Keahlian DPR RI dan Deputi Bidang Persidangan".

Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 257, Inspektorat UU menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat II;
- e. Perumusan kebijakan pengawasan;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- g. Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- h. Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- i. Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- j. Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- k. Pelaksanaan peran serta kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kejahatan keuangan;

- l. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- m. Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- n. Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
- o. Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- p. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- q. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- r. Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- s. Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- t. Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- u. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
- v. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;

- w. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat II.
3. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Aparat Inspektorat II.

Sasaran Strategis dari Inspektorat II berujung kepada meningkatnya kualitas dan kuantitas dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian intern Inspektur II terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan yang transparan dan akuntabel.

1. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II melalui kerja sama dengan pihak eksternal;
2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat II dalam mewujudkan Good Government atas kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan;
3. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat II.

BAB III

RANCANGAN AKUTUALISASI

A. Identifikasi Isu

a. Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko

Masalah :

Penentuan PKPT Inspektorat II masih belum terstruktur dan tepat sasaran. APIP masih cenderung mengagendakan auditnya secara manual, yakni hanya melaksanakan audit berdasarkan professional judgement atas suatu assersi management yang akan diverifikasi, atau berdasarkan kejadian dan peristiwa.

Penyebab :

Auditor internal Inspektorat II saat ini memang belum memiliki PKPT yang berbasis risiko, hal tersebut disebabkan karena Inspektorat II saat ini juga belum memiliki risk register atau dasar risiko yang digunakan dalam penyusunan PKPT tahun 2019. Pada prakteknya di lapangan Inspektorat II masih melakukan auditnya secara tradisional, melakukan perencanaan audit berdasarkan professional judgement yang berorientasi pada perolehan temuan yang mengarah pada penyimpangan prosedur yang cenderung dipandang oleh auditi sebagai mencari-cari kesalahan auditi tanpa memberikan nilai tambah bagi perbaikan kinerja auditi.

Kondisi yang Harapkan :

Penentuan risiko bisa dilihat dari berbagai pendekatan seperti besarnya anggaran, tahun terakhir dilakukannya audit, dan analisis beban kerja. Esensi penyusunan PKPT berbasis resiko inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemeriksa untuk melakukan audit berbasis risiko

Dampak :

Dampak dengan tidak adanya PKPT berbasis risiko adalah lemahnya pengendalian manajemen yang mana tidak dapat melakukan identifikasi risiko-risiko utama dalam unit kerja yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Selain itu juga menimbulkan adanya pemetaan ruang lingkup Audit yang tidak tepat sasaran. Perencanaan program kerja audit (PKPT) yang tidak didasari oleh sistem yang terstruktur akan berakibat terjadinya kegiatan penugasan audit tidak efektif dan efisien.

b. Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman pembuatan Kertas Kerja Audit

Masalah :

Dalam pelaksanaan kegiatan audit selama ini masih hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Irtama sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Inspektur Utama Nomor: IU/01/SETJEN DAN BK DPR_RI/IRTAMA/XI/2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, tetapi itu hanya mencakup garis besar kegiatan pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pembuatan Kertas Kerja Audit di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Penyebab :

Berdasarkan latar belakang diatas, tidak adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pembuatan Kertas Kerja Audit di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masing-masing auditor akan pentingnya prosedur Teknis Pelaksanaan audit yang dilakukan secara terstruktur dan dokumentasi hasil audit berupa Kertas Kerja Audit.

Kondisi yang Harapkan :

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan format KKA berfungsi sebagai alat untuk membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Melalui penyusunan KKA, auditor dapat mendokumentasikan proses dan hasil audit. Dokumentasi ini akan digunakan sebagai pendukung opini yang diberikan oleh auditor.

Dampak :

Dengan tidak adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan KKA yang tersusun dengan baik, maka segala bentuk eviden yang merupakan supporting dari penentuan OPINI audit tidak dapat dibuktikan secara efektif, hal tersebut disebabkan karena KKA tersebut tidak dapat dimengerti oleh pembaca dengan baik.

c. Belum terdapat aplikasi yang melakukan monitoring perhitungan DUPAK dalam pengembangan prosfesi audit

Masalah :

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Saat ini belum terdapat aplikasi

yang dapat membantu auditor dalam melakukan perhitungan nilai DUPAK secara komputerisasi, baik dalam melakukan perhitungan angka kredit secara otomatis maupun aplikasi yang dapat melakukan reminder berupa notifikasi terkait target dan pemenuhan nilai DUPAK bagi seorang auditor.

Penyebab :

Saat ini penilaian angka kredit (DUPAK) masih dilakukan secara manual dan memang belum dilakukan secara digitalisasi atas database DUPAK tersebut.

Kondisi yang Harapkan:

Dengan adanya pengisian dan monitoring DUPAK secara komputerisasi akan memudahkan para pegawai dalam melakukan input dan perhitungan angka kredit. Lebih lanjut penginputan DUPAK secara sistem juga sebagai bentuk monitoring apabila angka kredit tidak mencapai target.

Dampak :

Perhitungan DUPAK secara manual akan menimbulkan adanya risiko human error atau salah perhitungan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

B. Pemilihan Isu Prioritas
Teknik Analisis (USG)

Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG

No.	Isu	Kriteria			Total	Rangking
		U	S	G		
1.	Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko	4	5	5	14	1
2.	Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman pembuatan Kertas Kerja Audit.	3	4	4	11	2
3.	Belum terdapat aplikasi yang melakukan monitoring perhitungan DUPAK dalam pengembangan prosfesi audit	3	3	4	10	3

Keterangan:

U= Urgency (Penting)

S = Seriousness (Keseriusan)

G = Growth

Range

Skor 5 = Sangat Besar

Skor 4 = Besar

Skor 3 = Cukup

Skor 2 = Kecil

Skor 1 = Sangat Kecil

Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah: isu nomor 1,yaitu Belum adanya PKPT berbasis Risiko pada area Inspektorat II.

C. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan pemecahan isu melalui Teknik USG, maka didapat isu nomor 1, yaitu belum adanya PKPT tahunan berbasis Risiko. Oleh karena itu dibutuhkan pemecahan solusi melalui pemikiran saya Bersama dengan coach, dan mentor melalui gagasan berjudul "Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2020 Pada Area Pengawasan Inspektorat II"

D. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : **Inspektorat II**

Identifikasi Isu :
1. Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko
2. Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman pembuatan Kertas Kerja Audit
3. Belum terdapat aplikasi yang melakukan monitoring perhitungan DUPAK dalam pengembangan prosfesi audit

Isu yang Diangkat : Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko

Gagasan Pemecahan Isu : Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2020 Pada Area Pengawasan Inspektorat II

Tabel 3. Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Rapat dengan Internal Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Penjadwalan waktu rapat ke bagian TU - Pelaksanaan rapat - Pembuatan laporan singkat hasil rapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal rapat yang telah disetujui - Daftar hadir kegiatan rapat - Laporan singkat hasil rapat 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan Inspektorat II 	<p>Melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan unit kerja terkait, demi kelancaran aktualisasi PKPT 2020 berbasis risiko yang akan membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dan prosedur audit yang tepat sasaran,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan musyawarah 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam memecahkan suatu masalah 3. Profesional Segala bentuk keputusan yang diambil berdasar

				<p>2. Akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya pertanggung jawaban materi rapat dan laporan singkat hasil rapat yang telah dilakukan.</p> <p>3. Komitmen Mutu Kemauan keras dari adanya kesadaran untuk melakukan perubahan di lingkungan kerja</p>	akuntabel dan berkualitas.	<p>pada keahlian</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dalam rapat</p>
--	--	--	--	--	----------------------------	--

				Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan berbagai pihak seperti bagian TU, para auditor dan atasan langsung		
2	Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko	- Meminta data jumlah seluruh pegawai yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian beserta Analisis Beban	- Data0020penunjang terkait penyusunan PKPT berbasis risiko	Nilai Dasar PNS: 1. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan	Pengumpulan dan analisis data terkait penentuan tingkat risiko dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko akan meningkatkan kualitas dalam melakukan	1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan pengumpulan data terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip

		<p>Kinerjanya (ABK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminta data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan terkait pencapaian realisasi anggaran semua unit yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian - Koordinasi dengan bagian Tata Usaha Inspektorat Utama terkait data tindak lanjut hasil 		<p>n etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan stakeholder terkait.</p> <p>2. Akuntabilitas Kejelasan tujuan dalam permintaan data kepada unit lain</p> <p>3. Komitmen Mutu Efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan data penunjang sebagai bahan penyusunan PKPT</p>	<p>perencanaan audit dan prosedur audit sebagai dasar atau landasan kegiatan audit yang efektif dan efisien.</p>	<p>keterbukaan dalam pengumpulan data terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko</p> <p>3. Profesional Pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi dan koordinasi secara profesional berdasarkan prosedur yang berlaku,</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap data yang sudah</p>
--	--	---	--	--	--	--

		temuan BPK - Koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan terkait data pengadaan barang dan jasa atas periode yang akan di audit.		berbasis Risiko Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan unit lain.		diberikan oleh pihak lain
--	--	---	--	--	--	------------------------------

3	Membuat peta risiko dan PKPT 2020 berbasis risiko beserta kelengkapan pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan data sesuai jenis dan periode - Pengolahan data di dalam Microsoft Excel - Melakukan penetapan peta risiko berdasarkan hasil pengolahan data - Membuat PKPT 2020 berbasis risiko berdasarkan hasil peta risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - PKPT 2020 berbasis risiko yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan pemerintahan tahunan - Data risiko yang tersusun rapi 	Nilai Dasar PNS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Bertanggung jawab memenuhi pertanggung jawaban sebagai bukti hasil pelaksanaan Latihan Dasar. 2. Etika Publik Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak lain dalam proses pelaksanaan 3. Komitmen mutu Menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu pada penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko 	Penataan dan pengelolaan data secara tepat dan benar akan memudahkan dalam menentukan peta risiko yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penentuan PKPT berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan membuat peta risiko 2. Akuntabel Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dengan menggunakan perhitungan dan analisa peta risiko secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 3. Profesional Penyusunan peta risiko yang berdasar pada
---	--	--	--	--	---	---

				<p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i></p> <p>Kolaborasi antar unit dalam membuat suatu inovasi yang baru</p> <p>Pelayanan Publik</p> <p>Diharapkan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko tersebut dapat meningkatkan standar dan mutu pengawasan, sehingga akuntabilitas kinerja Setjen dan BK DPR RI dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada public</p>		<p>masukan dari para ahli</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko,</p>
--	--	--	--	---	--	---

4	Melakukan review PKPT 2020 berbasis Risiko beserta kelengkapan pendukungnya oleh atasan langsung.	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta pegawai Inspektorat II untuk melakukan review atas hasil pemetaan peta risiko ke dalam PKPT 2020 berbasis risiko - Meminta pegawai Inspektorat II untuk mencari risiko sebagai bekal pengawasan dari audit yang akan diawasinya - Menganalisis hasil review 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan review PKPT 2020 berbasis risiko - Kemudahan dan kesulitan dalam memahami PKPT 2020 berbasis risiko. - Form evaluasi yang dilakukan oleh atasan langsung - Masukan dari atasan langsung Terkait hasil review 	Nilai Dasar PNS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Bertanggung jawab terhadap hasil, serta meminta feedback untuk penyempurnaan hasil. 2. Etika publik Berkomunikasi dengan baik ketika meminta feedback pendapat terkait dengan produk yang sudah kita hasilkan. 3. Komitmen mutu (Melakukan audit tepat sasaran dengan Audit berbasis risiko demi tercapainya suatu hasil audit yang efektif, efisien dan terjaga kualitas mutunya). 	Hasil review yang dilakukan atas PKPT berbasis risiko akan meningkatkan kualitas hasil audit dan rekomendasi audit sesuai tingkatan risiko dan beban kerja yang dihadapi oleh unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan review PKPT Audit berbasis risiko 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam melaksanakan review PKPT berbasis risiko 3. Profesional Meminta masukan dari para ahli terkait penyusunan PKPT
---	---	---	--	--	--	---

				Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> Kolaborasi dalam hal penyempurnaan PKPT berbasis risiko Pelayanan Publik Mengukur seberapa besar manfaat dari suatu implementasi atas PKPT 2020 berbasis risiko dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penugasan audit..		berbasis risiko 4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan review PKPT berbasis risiko
5	Melaporkan hasil akhir kegiatan	- Pembuatan laporan - Sosialisasi materi PKPT 2020 berbasis risiko di lingkungan Inspektorat II	- Laporan hasil kegiatan - Pemanfaatan PKPT 2020 berbasis risiko di lingkungan	Nilai Dasar PNS: 1. Akuntabilitas (transparansi, tanggung jawab) 2. Nasionalisme (kepentingan bersama) 3. Etika publik (berkomunikasi dengan baik)	Hasil akhir kegiatan diharapkan akan membantu auditor mempermudah dalam penentuan pemetaan	1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan

		- Laporan singkat hasil sosialisasi akhir	Inspektorat II	<p>4. Komitmen mutu (efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu)</p> <p>5. Anti Korupsi (disiplin, berani, jujur)</p> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i></p> <p>Koordinasi antar unit dalam penyempurnaan hasil</p>	unit kerja yang akan diaudit berdasarkan landasan yang jelas.	<p>2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan</p> <p>3. Profesional Melaksanakan pelaporan hasil rancangan aktualisasi dengan meminta masukan dari para rekan auditor yang ahli di bidangnya</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran</p>
--	--	---	----------------	---	---	--

						dan tanggung jawab dalam penyusunan perencanaan audit yang dituangkan dalam PKPT 2020 berbasis risiko
--	--	--	--	--	--	---

BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

Pengendalian Intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian internal yang kuat akan membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. APIP diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah. APIP juga diharapkan memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Aparat pengawasan intern harus menyusun perencanaan tahunan sebelum melaksanakan tugas – tugasnya. Perencanaan tahunan disusun berbasis risiko untuk menentukan prioritas kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area – area organisasi yang memiliki paparan risiko terbesar. Oleh karena itu dalam hal tersebut Inspektorat II mulai menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2020 berbasis risiko. Berikut merupakan beberapa kegiatan yang telah CPNS lakukan demi memenuhi pelaksanaan aktualisasi Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko di area Inspektorat II.

Langkah pertama yang dilaksanakan oleh penulis setelah melaksanakan sidang akhir rancangan di Wisma Giryas Sabha Kopo adalah mengkomunikasikan dan melaksanakan presentasi singkat dengan Plt. Inspektur II yaitu Bpk. Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Hal ini dilakukan agar pimpinan mengetahui baik secara garis besar ataupun secara teknis yang akan penulis lakukan selama 30 hari habituasi di unit Inspektorat II.

Penulis berencana untuk mengaktualisasikan hasil rancangan penulis yang berjudul “Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 Berbasis Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II” dimana hal tersebut merupakan hasil pemilihan dari 3 isu yang dianggap *urgent* oleh penulis yang berada di dalam unit Inspektorat II itu sendiri,

Penulis telah berkordinasi dan melaksanakan konsultasi terhadap mentor terkait pemilihan isu tersebut. Untuk lebih menunjang fleksibilitas dalam pelaksanaan habituasi sebagai dasar koordinasi dengan instansi lain, maka penulis pun membuat Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi yang ditandatangani oleh Bpk Plt. Inspektur II yaitu Bpk. Drs. Setyanta Nugraha, M.M.

[illegible]

Langkah kedua dalam pelaksanaan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko adalah dengan mengadakan rapat internal dengan jajaran Inspektorat II yang terdiri dari para auditor madya, utama, dan pertama serta CPNS yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat II Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, rapat internal dilakukan untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II. Beberapa informasi yang diperoleh dan dapat dipertimbangkan dari rapat internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan PKPT Audit 2020 berbasis risiko Inspektorat II meliputi perencanaan klien pada kegiatan audit kinerja dan audit pengadaan barang dan jasa yang memiliki tingkat risiko yang tinggi berdasarkan jumlah anggaran, sumber daya manusia, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP dan nilai pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019.
2. Penyusunan PKPT Audit 2020 berbasis risiko Inspektorat II meliputi penyusunan personel audit dan jadwal pelaksanaan penugasan audit.
3. Penentuan klien dalam audit pengadaan barang dan jasa berdasarkan data yang di peroleh bagian Perencanaan melalui Aplikasi SIRUP.
4. Penentuan personel audit yang akan melakukan penugasan yaitu berdasarkan hasil perhitungan angka kredit yang di peroleh dari bagian TU Inspektorat Utama.
5. Penyusunan personel audit akan dibuat lebih efektif dan efisien yaitu terdiri dari 1 orang ketua tim, dan 2 orang anggota. Kemudian 1 orang pengendali teknis akan

menangani 3 tim audit dalam 3 penugasan audit yang berbeda.

6. Porsi tugas dimasing-masing jabatan akan dibuat sesuai dengan tingkatan dari tanggung jawab masing-masing auditor.

Gambar 2. Rapat Koordinasi Inspektorat II



Tantangan utama yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan klien yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. Adanya keterbatasan ini menyebabkan APIP harus menetapkan alokasi sumber daya dengan memfokuskan audit pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Audit intern berbasis risiko merupakan sebuah metodologi yang menghubungkan auditor internal dengan kerangka manajemen risiko keseluruhan organisasi pemerintahan.

Perencanaan audit intern berbasis risiko didasarkan pada tujuan organisasi birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan audit yang memberikan keyakinan bahwa, melalui pengendalian intern, seluruh risiko yang mengancam tujuan instansi/lembaga pemerintah telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima sehingga tujuan dapat tercapai. Perencanaan audit intern

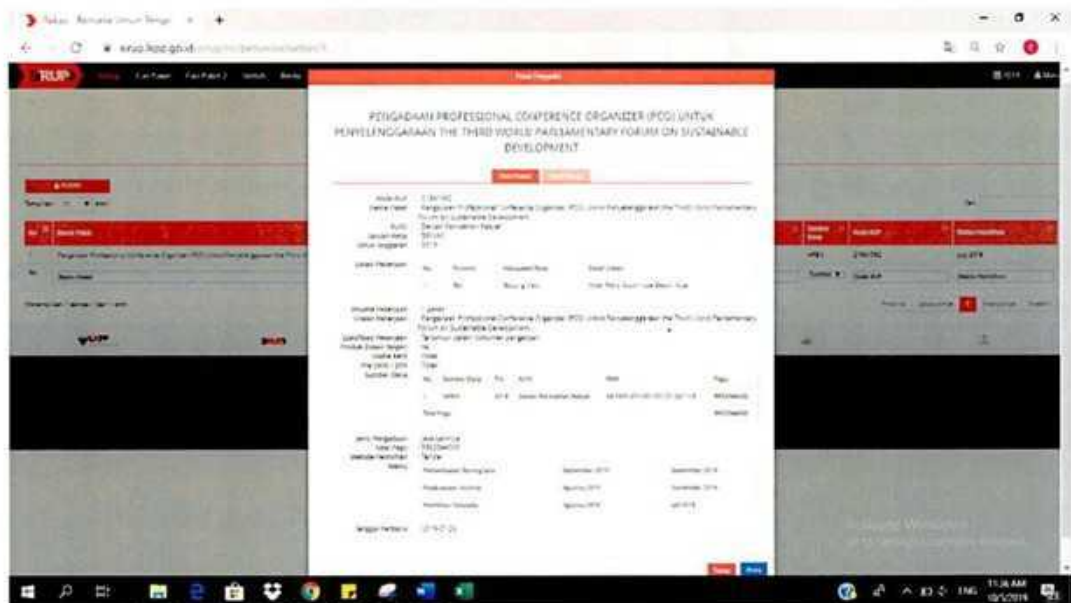
berbasis risiko memungkinkan APIP untuk memberikan jaminan atau asuransi kepada pimpinan instansi/lembaga pemerintah bahwa proses manajemen risiko telah menghasilkan tata kelola risiko yang efektif dan telah mempertimbangkan selera risiko yang ditetapkan. Perencanaan audit intern berbasis risiko merupakan perluasan dan penyempurnaan dari sistem audit tradisional yang lebih menekankan audit pada pengendalian intern semata dan melaporkan kecukupan dan efektivitas dari pengendalian intern saja. Untuk itu dibutuhkan suatu peta risiko dari sudut pandang auditor sebagai langkah awal untuk mencapai audit intern berbasis risiko.

Konsep PKPT 2020 Berbasis Risiko pada area pengawasan inspektorat II merupakan bentuk dari pembaharuan (inovasi) agar perencanaan audit intern ke depannya berbasis kepada risiko sehingga menghasilkan suatu kegiatan audit yang efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan suatu peningkatan komitmen mutu di unit Inspektorat II demi terwujudnya kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam kegiatan rapat internal ini pun nasionalisme juga tercermin bahwa konsolidasi ini dilakukan secara penuh nuansa kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam rangka mencapai kesepakatan terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dan penentuan kriteria-kriteria yang akan diintegrasikan dalam penyusunan PKPT tersebut. Dalam pelaksanaan rapat pun tata krama, sopan santun, komunikasi dan etika dalam menyampaikan pendapat yang baik diimplementasikan sebagai wujud internalisasi dari nilai etika publik di dalamnya.

Kegiatan 2 : Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko

Dalam pengumpulan data penunjang, penulis melakukan pendekatan kepada auditor senior terlebih dahulu untuk mengetahui analisis data apa saja yang diperlukan dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko. Auditor Inspektorat II sebelumnya telah melakukan analisis data penunjang terkait penyusunan peta risiko dalam memenuhi penilaian IACM Inspektorat II menuju level 3. Data yang telah dianalisis sebelumnya adalah Laporan Anggaran dan Realisasi yang dikelola oleh 10 Biro di bawah area pengawasan Inspektorat II tahun 2017 – 2019 pada Deputy Bidang Persidangan dan Badan Kehlian beserta jajaran di bawahnya, yang diperoleh dari bagian Perencanaan, Analisis Beban Kinerja (ABK) tahun anggaran 2017-2019 dari bagian kepegawaian, serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK di 10 Biro dari area pengawasan Inspektorat II. Dari hasil analisis tersebut, telah dilakukan penyusunan peta risiko dan pembuatan tingkat risiko auditi dari 10 Biro dari area pengawasan Inspektorat II yang telah dilakukan pada bulan Juli 2019. Analisis Peta Risiko tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 3.

Manfaat dari penyusunan aplikasi peta risiko adalah untuk memudahkan Inspektorat II dalam mengidentifikasi risiko dari setiap auditi yang berfungsi sebagai *Early Warning* dalam melakukan pengawasan yang menjadi landasan bagi Inspektorat II dalam menjalankan audit yang berbasis risiko, serta memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan auditi dalam menentukan ruang lingkup kegiatan audit dan pengawasan.



Gambar 5. Aplikasi SIRUP

Dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis juga melakukan koordinasi dengan bagian Tata Usaha Inspektorat Utama untuk memperoleh data kepegawaian auditor yang terdiri dari data perhitungan angka kredit terupdate yaitu per semester II 2018, database kompetensi auditor yaitu yang berisi informasi diklat auditor dan rincian *Risk Register* atau dokumen SPIP (Sistim Pengendalian Internal). Data tersebut digunakan dalam penyusunan personel tim audit agar sesuai dengan susunan jabatan dan porsi kerja yang seharusnya, sedangkan untuk *Risk Register* digunakan untuk menentukan ruang lingkup audit berdasarkan hasil penilaian pengendalian internal yang telah dilakukan oleh setiap unit kerja.

Pada tahapan ini penulis melakukan koordinasi dengan unit lain, khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Tata Usaha Inspektorat Utama. Komunikasi dijalin dengan rasa sopan santun, dan sesuai dengan prosedur birokrasi yang ada sebagai internalisasi dari nilai etika publik yang ada di dalamnya. Biro Perencanaan dan Tata Usaha Inspektorat Utama juga

menunjukkan sikap yang kooperatif dan sangat mendukung atas kegiatan aktualisasi ini, sikap saling mendukung dan kooperatif juga menunjukkan tingkat integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja. koordinasi dengan bagian Perencanaan dan Tata Usaha Inspektorat Utama serta bimbingan dengan coach Ibu Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. merupakan penerapan nilai *whole of government* (WoG) sebagai hubungan lintas sektor Bidang untuk menciptakan sistem pengawasan internal pada area pengawasan Inspektorat II

Manfaat dari pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko ini adalah sebagai bahan input pengolahan data, dimana data-data yang valid tersebut dapat merepresentasikan hasil dari pemetaan risiko dari sudut pandang auditor, agar tercapai kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, hal tersebut sebagai implementasi dari nilai komitmen mutu dan juga akuntabilitas



Gambar 6. Berkoordinasi dengan TU Inspektorat Utama dan Perencanaan & Keuangan

Kegiatan 3 : Membuat peta risiko dan PKPT 2020 berbasis risiko beserta kelengkapan pendukung.

Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel*. Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dilakukan setelah penentuan peringkat risiko yang terdapat pada peta risiko yang telah dilakukan analisis sebelumnya pada gambar 3. Hasil pemeringkatan pada peta risiko kemudian dipilih dari 4 peringkat merupakan unit kerja yang memiliki tingkat risiko yang tinggi di tahun 2019. Sedangkan untuk audit pengadaan barang dan jasa, unit kerja yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa dengan nilai yang tinggi merupakan unit yang memiliki kemungkinan adanya nilai risiko yang tinggi.

Gambar 7. Peringkat Peta Risiko

PETA RISIKO 2019 Inspektorat II			AUDIT KINERJA		AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA			RANGKAIAN RENDAH
No	KODE UNIT	UNIT / BIDANG	Total Bobot	PERINGKAT RENDAH	TOTAL	URAIAN	BOBOT	
1	5781	Biro Persidangan I	8	2	-	-	-	-
2	5782	Biro Persidangan II	6	3	-	-	-	-
3	5783	Biro Kerjasama Antar Parlemen	5	5	9,953,344,000	Di bawah 10 Milyar	1	2
4	5784	Biro Kesekretariatan Pimpinan	6	3	-	-	-	-
5	5785	Biro Pemberitaan Parlemen	9	1	46,333,450,000	10-50 Milyar	2	1
6	5796	Pusat Perancangan UU	4	6	-	-	-	-
7	5797	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan UU	4	6	-	-	-	-
8	5798	Pusat Kajian Anggaran	3	9	-	-	-	-
9	5799	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3	9	-	-	-	-
10	5800	Pusat Penelitian	4	6	-	-	-	-

Setelah menentukan unit dan biro yang akan diaudit kemudian penulis menentukan auditi yang akan diaudit dengan menggunakan *Risk Score* yang berasal dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Dokumen SPIP). Dari hasil scoring tersebut, kemudian penulis memilih auditi yang memiliki score paling tinggi untuk dimasukkan ke dalam PKPT 2020 berbasis risiko.

Gambar 8. Scoring Dokumen SPIP

Rincian Dokumen Identifikasi Risiko
Periode 2018

NO	KODE UN	UNIT / BIRO	Auditee	Risk Score
1	5781	Biro Persidangan I	Bagian Sekretariat Komisi I	
			Bagian Sekretariat Komisi II	
			Bagian Sekretariat Komisi III	
			Bagian Sekretariat Komisi IV	
			Bagian Sekretariat Komisi VI	
			Bagian Sekretariat Komisi VII	9
			Bagian Sekretariat Komisi VIII	10
			Bagian Sekretariat Komisi IX	
			Bagian Sekretariat Komisi X	
			Bagian Sekretariat Komisi XI	
			Bagian Persidangan Paripurna	
2	5782	Biro Persidangan II	Bagian Sekretariat Badan Legislatif	
			Bagian Sekretariat Badan Anggaran	8
			Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	
			Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	
			Bagian Sekretariat Panitia Khusus	16
3	5783	Biro Kerjasama Antar Parlemen	Bagian Sekretariat Kerja sama Organisasi Internasional	2
			Bagian Sekretariat Kerja sama Organisasi Regional	
			Bagian Sekretariat Kerja sama Bilateral	
			Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	
4	5784	Biro Kesekretariatan Pimpinan	Bagian Sekretariat Ketua	12
			Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	
			Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	
			Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	
5	5785	Biro Pemberitaan Parlemen	Bagian Media Cetak dan Media Sosial	25
			Bagian Hubungan Masyarakat	20
			Bagian Televisi dan Radio Parlemen	8
			Bagian Penerbitan	-
6	5796	Pusat Perancangan UU		7
7	5797	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan UU		7
8	5798	Pusat Kajian Anggaran		15
9	5799	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara		
10	5800	Pusat Penelitian		

Tahap selanjutnya, setelah penulis menentukan auditi atau klien yang akan diaudit, kemudian penulis membuat *timetable* atau *Schedule* kegiatan audit, serta penentuan personel audit yang terdiri dari Pengendali Teknis yang merupakan Auditor Madya, Ketua Tim yang merupakan minimal Auditor Muda,

dan Anggota yang terdiri dari 3 orang yang merupakan Auditor Pertama maupun Auditor Terampil. Dalam pembuatan jadwal dan penentuan personel audit, Penulis melakukan koordinasi kembali dengan seluruh Auditor Inspektorat II agar dapat memberikan pendapat mengenai penjadwalan dan personel audit.

Gambar 9. Timetable/Schedule dan Penyusunan Staff Audit
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (P.K.P.T.)
INSPEKTORAT II SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kegiatan Utama, Tambahan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agst				Sept				Okt				Nov				Des			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
A.	AUDIT																																																
	Inden																																																
	Dani W																																																
	Naharjani																																																
	Harsa Kus																																																
	Imam																																																
	Rahm																																																
	Fauz																																																
	Imi																																																
	Pam																																																
	Inden																																																

Gambar 10. Diskusi dengan Mentor dan para Auditor untuk menyusun Schedule Audit dan Pesonel Audit



Dalam rangkaian proses penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis melaksanakan komunikasi yang efektif, dan efisien sesuai dengan nilai-nilai komitmen mutu serta menerapkan proses berpikir yang inovatif dan kreatif demi menunjang proses kegiatan pengawasan yang semakin efektif dan efisien kedepannya di area Inspektorat II. Di samping itu prinsip akuntabilitas dalam pemaparan data risiko yang ada di setiap area pengawasan Inspektorat II, akan menjadikan sebuah *Early Warning* atas kemungkinan terjadinya suatu *Fraud* atau kecurangan.

Kegiatan 4 : Melakukan review PKPT 2020 berbasis Risiko beserta kelengkapan pendukungnya oleh atasan langsung.

Dalam melakukan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis perlu melakukan konsultasi kepada atasan langsung yaitu Auditor Madya, demi penyempurnaan hasil penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko. Berdasarkan hasil review yang diberikan oleh Auditor Madya, diketahui bahwa dalam penyusunan PKPT 2020 akan memungkinkan adanya perubahan jadwal kegiatan, hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan mandatory yang berasal dari atasan oleh karena itu adanya kemungkinan revisi yang bersifat kondisional atas PKPT 2020 yang telah terkonsep sebelumnya. Konfirmasi lebih lanjut oleh Auditor Madya, perlu dilakukan monitoring atas perhitungan Angka Kredit yang bisa dimasukkan ke dalam komponen pendukung dalam PKPT 2020 berbasis risiko. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui nilai angka kredit yang harus dicapai untuk dapat melakukan peningkatan jabatan tepat pada waktunya.

Hasil review yang dilakukan atas PKPT berbasis risiko akan meningkatkan kualitas hasil audit dan rekomendasi audit sesuai dengan tingkatan risiko dan beban kerja yang dihadapi oleh unit kerja. Nilai-nilai yang dapat di aplikasikan dalam melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko yaitu

Akuntabel dalam melaksanakan prinsip keterbukaan, Profesional dalam meminta masukan dari para ahli terkait penyusunan PKPT berbasis risiko, dan Integritas yaitu memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan review PKPT berbasis risiko.

Gambar 12. Melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko dengan Auditor Madya



Kegiatan 5 : Melaporkan hasil akhir kegiatan.

Pada tahap akhir ini, penulis memaparkan hasil dari aktualisasi atas rancangan aktualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan aktualisasi dilakukan pada masa habituasi selama jangka waktu 30 hari di lingkungan pekerjaan Inspektorat II, Inspektorat Utama dan lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Output akhir yang didapat setelah melalui 5 tahap kegiatan dipertanggungjawabkan di dalam kegiatan akhir ini. Pemaparan hasil aktualisasi dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 pada jam 1 siang, yang dihadiri oleh Ibu Inspektur II, dan seluruh Auditor di area Inspektorat II.

Gambar 13. Sosialisasi hasil akhir PKPT 2020 Berbasis Risiko



E. Stakeholder

Para Pejabat Fungsional Auditor ITTAMA, Pejabat Pelaksana TU ITTAMA, Auditor Inspektorat II Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta CPNS di lingkungan Inspektorat II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

F. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Beberapa kendala yang akan dihadapi penulis adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan akses informasi
2. APIP kekurangan personil yang memahami proses bisnis
3. APIP kekurangan personil yang memahami konsep penilaian maturitas manajemen risiko, identifikasi risiko dan analisisnya

Dalam menghadapi kendala tersebut, penulis memiliki beberapa strategi untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

2. Melakukan pemahaman terkait proses bisnis di awal penugasan audit sebelum melakukan prosedur audit
3. Melakukan *Transfer Knowledge* kepada teman sejawat terkait dengan manajemen risiko

G. Analisis Dampak

1. Hasil Inisiatif

Dampak Negatif :

Dampak dengan tidak adanya PKPT berbasis risiko adalah lemahnya pengendalian manajemen yaitu tidak dapat melakukan identifikasi risiko-risiko utama dalam unit kerja yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Selain itu juga menimbulkan adanya pemetaan ruang lingkup Audit yang tidak tepat sasaran. Perencanaan program kerja audit (PKPT) yang tidak didasari oleh sistem yang terstruktur akan berakibat terjadinya tumpang tindih penugasan audit yang kemudian akan mempengaruhi efektifitas dan efisien dalam penugasan audit

Dampak Positif :

Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area-area organisasi yang memiliki paparan risiko terbesar. Oleh karena itu dengan adanya PKPT 2020 berbasis risiko, akan memberikan nilai tambah terhadap perencanaan audit yang mana telah terdapat dasar yang jelas dalam pemetaan auditee, dan diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisien dalam penugasan audit.

2. Nilai Dasar ANEKA

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan

publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Sangat pentingnya nilai akuntabilitas karna di dalamnya terdapat nilai-nilai terkait pertanggung jawaban kinerja baik individu, kelompok, maupun organisasi, Mendahulukan kepentingan Publik, Partisipatif, dan Transparan. Jika dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi tidak adanya nilai Akuntabilitas maka kegiatan audit Inspektorat II tidak bersifat akuntabel, netral, dan transparan. Oleh karena itu dengan tidak adanya PKPT 2020 berbasis risiko akan menimbulkan adanya anggapan bahwa program kerja tidak dibuat secara akuntabel dan hanya bertujuan mencari-cari masalah karena tidak terdapat dasar penentuan yang tepat, yang mana dalam pembuatan PKPT sebelumnya pada Inspektorat II tidak terdapat dasar yang terdokumentasikan secara jelas dan transparan sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya dalam penentuan auditi pada pemetaan program kerja audit tahunan (PKPT).

b. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Rela Berkorban, Kepentingan Bersama, dan Musyawarah.

Dalam kegiatan organisasi sikap nasionalis sangat diperlukan, seperti dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu organisasi pengambilan keputusan harus berdasarkan

kepentingan bersama yaitu kepentingan publik atau masyarakat untuk dapat mencapai satu tujuan.

Jika dalam melaksanakan Aktualisasi tidak adanya nilai Nasionalisme maka rancangan aktualisasi terkait Evaluasi kegiatan audit Inspektorat II berupa penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko tidak akan didapatkan kesepakatan untuk melaksanakan program tersebut karena tidak mendahulukan kepentingan bersama, sehingga tidak didapatkannya keputusan pelaksanaan program dan masukan-masukan yang membangun terkait penyusunan PKPT 2020 area Inspektorat II.

c. Etika Publik

Etika Publik erat kaitannya dengan nilai-nilai Jujur, cermat, Disiplin, Hormat, Sopan Santun dalam bersikap dan bertindak. Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko sangat diperlukan nilai-nilai etika public, terutama dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, misalnya dalam melakukan permohonan data dan komunikasi atas pelaksanaan aktualisasi tersebut. Apabila tidak menerapkan nilai-nilai Etika Publik tersebut maka akan berdampak tidak terealisasinya kegiatan aktualisasi tersebut dikarenakan kurangnya menerapkan nilai sopan santun dan rasa hormat, sehingga auditee pun enggan untuk memberikan data.

d. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu adalah bagaimana pelayanan seorang ASN harus berorientasi pada hasil dan memiliki mutu yang bagus, dan erat kaitannya dengan efisien efektifitas serta Inovasi,

Jika dalam suatu kegiatan audit di Inspektorat tidak melakukan peningkatan program kerja dan tidak melakukan inovasi yang diperlukan maka kualitas pemeriksaan dan audit pada Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP masih berada di level 2 dan tidak akan menuju ke level 3. Apabila PKPT 2020 berbasis risiko tidak diterapkan maka kualitas dan kinerja Inspektorat Setjen dan BK DPR RI akan tertinggal dengan Inspektorat di Lembaga atau Instansi lainnya.

e. Anti Korupsi

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Selain itu Inspektorat berfungsi sebagai kontrol untuk meminimalisir risiko-risiko praktik korupsi yang terjadi di Sekjen dan BK DPR RI. Namun apabila Inspektorat belum memiliki PKPT Berbasis Risiko sebagai dasar dari program audit yang akan dilaksanakan maka kegiatan audit dan pengawasan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga risiko adanya praktik korupsi tidak dapat terdeteksi dengan tepat.

H. Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan	Agustus 2019	September 2019				Oktober 2019
	Week	Week				Week
	4	1	2	3	4	1
Rapat dengan jajaran Internal Inspektorat II						
Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko						
Membuat PKPT berbasis Risiko beserta dokumen pendukungnya						
Melakukan review atas PKPT berbasis Risiko beserta kelengkapan pendukungnya yang dilakukan oleh atasan langsung						
Melaporkan hasil akhir kegiatan						

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Auditor Intern Pemerintah adalah pejabat pada lingkungan pemerintah baik pusat ataupun daerah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Auditor Intern Pemerintah memiliki tugas utama melakukan audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan. Semua jenis pelaksanaan tugas ini memiliki fungsi yang secara garis umum sama, yaitu memberikan keyakinan kepada pimpinan kementrial/Lembaga bahwa tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah telah berjalan secara efektif. Efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan pengawasan yang optimal, pelaksanaan penugasan harus berfokus pada identifikasi risiko, penilaian risiko, termasuk penilaian atas mitigasi risiko yang telah dijalankan. Untuk dapat melaksanakan penugasan ini, diperlukan suatu perencanaan auditi tahunan berbasis risiko (*risk based audit plan*). Penentuan prioritas kegiatan audit intern harus didasarkan pada evaluasi/penilaian risiko, dan seluruh APIP harus menyusun perencanaan audit tahunannya dengan berbasis risiko.

Tujuan dan manfaat Perencanaan audit tahunan berbasis risiko adalah untuk:

- a. Membantu unit audit intern focus pada hal-hal yang signifikan dan berdampak luas seperti identifikasi risiko-risiko utama dalam organisasi yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan
- b. Membantu pimpinan Kementrian/Lembaga/Pemda dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif
- c. Mengidentifikasi risiko-risiko utama semua proses bisnis.

Hasil proses Perencanaan Audit Intern Tahunan adalah daftar *Auditable Units* terpilih, disusun dalam berdasarkan urutan signifikansi atau prioritasnya, yang memerlukan asurans dan penyempurnaan atas sistem manajemennya. Dengan menetapkan urutan klien berdasarkan prioritasnya, penugasan diharapkan akan menghasilkan usulan perbaikan, memberikan nilai tambah yang optimal dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi. Dengan demikian, aktivitas audit akan lebih akan lebih mampu memberikan keyakinan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan klien akan dapat tercapai.

B. Saran

PKPT Berbasis Risiko disusun untuk menyiapkan Inspektorat menuju level 3. Risiko merupakan hambatan-hambatan yang bisa mengurangi atau menghambat tujuan. Orientasi Inspektorat sudah melihat ke depan sehingga perencanaan PKPT harus berbasiskan Risiko. Risiko dapat berdampak terhadap organisasi Inspektorat perlu menemukan cara-cara baru untuk melakukan tugas dan fungsinya. Auditor diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap organisasi yang diperiksa. Risiko berasal dari eksternal dan internal. APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi serta memperhatikan Renstra. PKPT berbasis risiko diawali

dengan menyusun Peta Audit (Audit Universe) yang terdapat pada wilayah kerja Inspektorat. Penentuan risiko bisa dilihat dari berbagai pendekatan seperti besarnya anggaran, tahun terakhir dilakukannya audit, perubahan manajemen, analisis beban kerja dan lain-lain. Esensi penyusunan PKPT berbasis resiko inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemeriksaan untuk melakukan audit.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Kepada Pak Irtama



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 3713 88144 - 8211 3713 8211 3713 8211 3713 8211 www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR : IP/229/VIB/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, **PT Inspektur II** Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Fitriyati Satrio, S.E.**
 NIP : **198204072013032003**
 Jabatan : **Asisten Ahli Pertama**
 Unit Kerja : **Inspektorat II**
 Mendaftar : **Margaretha Susanti, S.E.**

Adalah (sewa CPNS) Kelompok II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang melaksanakan kegiatan **Aktualisasi** sejak tanggal **25 Agustus 2019** - **5 Oktober 2019**. Adapun kegiatan **Aktualisasi** yang dilakukan adalah mengikuti **Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Berbasis Risiko** pada Area Inspektorat II.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai bukti pelaksanaan dan penunjang kegiatan.

Jakarta, 29 Agustus 2019
 PT Inspektur II

Margaretha Susanti, S.E.
 NIP. 1982031519903120002

Drs. Sutirna Teguh, M.M.
 NIP. 196207191980311001

2. Surat Undangan Rapat Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 3713 88144 - 8211 3713 8211 3713 8211 3713 8211 www.dpr.go.id

Nomor : **SP/279/VIB/2019** Di Jakarta, 29 Agustus 2019

Sifat : **Rapat**
 Dengan : **Sigra**
 Perihal : **Undangan**

Yth,

1. Inspektur II
2. Inspektur I
3. Asisten Ahli Pertama
4. Asisten Ahli Pertama
5. Asisten Ahli Pertama
6. Asisten Ahli Pertama
7. Asisten Ahli Pertama
8. Asisten Ahli Pertama
9. Asisten Ahli Pertama
10. Asisten Ahli Pertama

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
 Jakarta

Sehubungan dengan ini, dengan ini mengundang Saudara untuk hadir dan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Waktu : **Senin, 2 September 2019**
 Pukul : **08.00 WIB**
 Acara : **Rapat Koordinasi Penyusunan PKPT Tahun 2020 Berbasis Risiko**
 Lokasi : **Atika**
 Tempat : **Ruang Rapat Inspektorat II**

Harap perhatian dan kehadiran Saudara, sertaicipation terimakasih.

PT Inspektur II

Drs. Sutirna Teguh, M.M.
 NIP. 196207191980311001

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Kepada Pak Irtama



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR : 1P/229-V/6/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Pt. Impresia** di bawah naungan **Indo Bank** Kantor Pusat, dengan **Pewakil: Rizkiy Haryati**, Indonesia, menandatangani surat ini sebagai berikut:

Name	Florent Leclerc, S.E.
Age	199210172010007002
Location	Avenue A24 Port-au-Prince
Unit/Case	Impediment 1
Mother	Marjorie Duval, S.E.

Adapun untuk CPNS Gegerip II Swadaya jember dan Bekerjasama CPNS II yang melaksanakan kegiatan Adhikaryas mulai tanggal 21 Agustus 2019 - 3 Oktober 2019 Adapun kegiatan Adhikaryas yang dilakukan adalah melakukan Pengajaran Program Kerja Pengawasan Tahanan (PPPT) 2020 Bersama Staf Pda Area Intelkom 1

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai bukti-buktinya dan untuk
 pengingat (sewa)

Aspirin Potentially

Margaretta Suter, D.D.
R.D.# 780291624301127801

2. Surat Undangan Rapat Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko

[illegible]

1. Imperial II
2. Keres Berang Tu Imperial Utama
3. Para Banteng Tu Imperial Utama
4. Kuda Imperial II
5. 370 Imperial Utama

Sejarah Imperial dan Banteng Kuda Imperial II
Jember

Dengan 14 karni menghimpunkan ketidaktif. Souda's jadi perantara yang akan dibicarakan pada

Mariyanggal	Senin, 2 September 2019
Waktu	01.00 WIB
Acara	Kapal Kuantitas Rembulan NPT Takut 2019 Berangkat
	Perahu
Tempat	Busung Sapit Impektasi 2.

Not possible for Andrew Sauter, now again under lock.

(Pg. 30 paragraph 2)

2014, University of Michigan, 25 pp.
 ISBN: 9780471725000

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAMILAN
OFFICE PERAWANGAN RAJYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-56, Jakarta 10275
Telp. 021-77960000-021-77960001 Fax. 021-77960002

 **SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52/2, Jakarta 10275
Telp. (021) 6714 3434, 6714 3733, 6714 3533, 6714 3633
Faks. (021) 6714 3434, 6714 3733, 6714 3533, 6714 3633
Email: sekretariat@kemkes.go.id

[illegible]

1. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
2. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
3. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
4. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
5. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
6. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
7. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
8. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
9. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.
10. Pasien akan merasa nyeri jika tidak melakukan perawatan gigi atau melakukan perawatan gigi yang salah yang dapat mengakibatkan gigi berlubang atau gigi berlubang yang semakin parah.

Report of a patient with a 10-year history of


 University of Toronto
 1280 Midland Ave. #100
 Scarborough, ON M1V 3Z9
 Tel: 416-291-0711 ext. 2323
 Fax: 416-291-0711 ext. 2324
 Email: info@utoronto.ca

7. Dokumentasi Proses Permintaan Data Kepada TU ITTAMA dan Bagian Perencanaan dan Keuangan



8. Dokumentasi Permintaan Data melalui Email dengan Bagian Keuangan



9. Dokumentasi Output Berupa PKPT 2020 Berbasis Risiko

[illegible]

10. Dokumentasi Kegiatan dengan Mentor dan Diskusi dengan Auditor Inspektorat II



11. Kegiatan Reviu PKPT 2020 Berbasis Risiko oleh Atasan Langsung



12. Kegiatan Sosialisasi Hasil Final PKPT 2020 Berbasis Risiko dan Laporan singkat



**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN AKTUALISASI CPNS DI
INSPEKTORAT II**

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019
Waktu : 13.00 WIB – 15.00 WIB
Acara : Rapat koordinasi membahas Kegiatan Pengawasan dan Kegiatan Aktualisasi CPNS di Inspektorat II
Ketua Rapat : Furqony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kh.
Peserta Rapat : Para Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat II
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II, Lantai 5

I. Pendahuluan

1. Rapat dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Inspektur II, Furqony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kh.
2. Rapat koordinasiawali dengan berkenalan di Inspektorat II
3. Rapat yang membahas kegiatan Pengawasan yang akan dilaksanakan di Bulan Oktober s.d. Desember 2019 dan Kegiatan Aktualisasi CPNS di Inspektorat II

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Kegiatan diskusi mengenai agenda kegiatan yang akan dilakukan di Inspektorat II mulai dari Bulan Oktober s.d. Desember 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:
 - a. Pelaksanaan penyusunan PhPT Inspektorat II Tahun 2020
 - b. Rencana melaksanakan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Tanggal 25 Oktober s.d. 25 November 2019
 - c. Rencana melaksanakan Evaluasi Realisasi Anggaran TW III TA 2019 pada Tanggal 7 s.d. 18 Oktober 2019
 - d. Rencana melaksanakan Pemantauan TLHP Inspektorat II pada Tanggal 2 s.d. 13 Desember 2019

13. Surat undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi Hasil Final Aktualisasi

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52/2 Jakarta 10270
Telp. (021) 5713 340 Fax. (021) 5713 423/5713 425/5713 426/5713 427 www.dpr.go.id

No. : 1020/K/2019
Dit. : 06
Dit. : 06
Dit. : 06

Yth:
1. Inspektur II
2. Kepala Bagian TU Inspektorat Utama
3. Para Kepala TU Inspektorat Utama
4. Auditor Inspektorat II
5. JPU Inspektorat Utama
Sesuai surat undangan dari Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan ini kami mengundang Saudara pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Koordinasi & Pembahasan Aktualisasi CPNS Inspektorat II
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Hal tersebut dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Inspektur II
[Signature]
Furqony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kh.
NIP. 19851212 19832 2 001

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52/2 Jakarta 10270
Telp. (021) 5713 340 Fax. (021) 5713 423/5713 425/5713 426/5713 427 www.dpr.go.id

Jakarta, 06/10/2019

No. : 1020/K/2019
Dit. : 06
Dit. : 06
Dit. : 06

Yth:
1. Inspektur II
2. Kepala Bagian TU Inspektorat Utama
3. Para Kepala TU Inspektorat Utama
4. Auditor Inspektorat II
5. JPU Inspektorat Utama
Sesuai surat undangan dari Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan ini kami mengundang Saudara pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Koordinasi & Pembahasan Aktualisasi CPNS Inspektorat II
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Hal tersebut dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Inspektur II
[Signature]
Furqony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kh.
NIP. 19851212 19832 2 001

14. Kegiatan Coaching



15. Dokumentasi Kartu Kendali Bimbingan

Sekretariat Jenderal dan Badan Kajian
Desain Pendidikan Kajian Republik Indonesia

PESERTA

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2019**

Nama : E. Anggraini, S.Pd. Nama Coach : L. Lestari, S.Pd. Nama Coach : L. Lestari, S.Pd.

Instansi : Universitas ... No. & Hari ...

No	Tanggal Pembimbingan	Isi Pembimbingan atau Materi	Hasil Pembimbingan	Rencana Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	24 Agustus 2019	10.1.1. Rencana ...	Terdapat ...		
2	24 Agustus 2019	10.1.2. Rencana ...	Terdapat ...		
3	24 Agustus 2019	10.1.3. Rencana ...	Terdapat ...		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1. Pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh pembimbing dan bimbingan oleh coach

Anggota Bidang Pembinaan
Pusat dan Substansi ...

Materi ...

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2019

Nama : E. Anggoro, Satrio Nama Coach : G. Hana, Purnamasari, S.H., LL.M.
Instansi : Mahkamah Agung
NIP : 8001040330-201903

No.	Tanggal Pembimbingan	Ru. Pembimbingan yang Ditugas	Media Pembinaan	Isi Pembimbingan Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	10 / 01 / 2019	Wart. Sarawati, Bantul	Temp. 1010		
2	11 / 01 / 2019	Banyuwangi, Jember	Temp. 1010		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Det.				

(*) Pembimbingan yang telah
selesai pembimbingan yang
diakhiri dengan tanda Coach

Kapala Bidang Pembinaan
Pendidik Dasar dan BK CPNS RI

Rumanto, SH., MH.

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2019

Nama : E. Anggoro, Satrio Nama Mentor : M. Hana, Purnamasari, S.H., LL.M.
Instansi : Mahkamah Agung
NIP : 8001040330-201903

No.	Tanggal Pembimbingan	Ru. Pembimbingan yang Ditugas	Media Pembinaan	Isi Pembimbingan Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
1	10 / 01 / 2019	Wart. Sarawati, Bantul	Temp. 1010		
2	11 / 01 / 2019	Banyuwangi, Jember	Temp. 1010		
3	12 / 01 / 2019	Banyuwangi, Jember	Temp. 1010		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Det.				

(*) Pembimbingan yang telah
selesai pembimbingan yang
diakhiri dengan tanda Mentor

16. Dokumentasi Data Anggaran

4/15/2018

Perencanaan - DOTS RI

JUMLAH PER BIRO - DIPA TAHUN ANGGARAN 2019 UNIT DEWAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Jumlah
59	BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN	105.179.724.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN	87.366.242.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	464.515.841.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	138.383.453.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	7.933.929.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	2.811.234.807.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	84.362.500.000
Total		3.693.176.491.000

Hak Cipta © 2011
Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) - Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) - Sekretariat
Jenderal DPR RI

- Transition Filter
- Filter peta lingkup Perpres / Peraturan / Keputusan / Keputusan
- Tabel Laporan Perpres
- ABK Keuangan
- Statistik keuangan statistik perpres / keputusan

**JUMLAH PER BIRO - DIP
TAHUN ANGGARAN 2019
KEGIATAN**

Tanggal Cetak: 15-08-2019

KODE	URAIAN	JUMLAH
59	BIRO KESEKRETARIATAN PRESIDEN	8.000.537.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	4.954.020.000
93	BIRO TARIKIM	227.245.575.000
123	INSPEKTORAT I	3.511.567.000
124	INSPEKTORAT II	3.560.541.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	7.567.762.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	2.442.081.000
128	BIRO PENKULIAHAN PARLEMEN	185.952.882.000
129	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23.629.681.000
133	PUSAT DATA DAN INFORMASI	29.612.523.000
138	PUSAT PERANTANGAN UNDANG-UNDANG	17.802.702.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	4.852.067.000
140	PUSAT KAJIAN ANGGARAN	5.256.830.000
141	PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	3.033.333.000
145	BIRO PROTOKOL	10.706.959.000
146	BIRO HUKUM DAN PENJAJARAN MASYARAKAT	3.422.303.000
147	BIRO KEPENGAWATAN DAN ORGANISASI	36.238.775.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	290.675.164.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	1.186.237.245.000
153	PUSAT PENELITIAN	14.055.277.000

17. Dokumentasi Data TLHP

REKAPITULASI RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Lampiran Surat Kejur Nomor: 17/S/XVI/01/2019

No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TDD
1	Proyek Pembenah Fisik dan Proyek Sosialisasi Kemandirian dan Gaya Sahaja DPR TA 2003 & 2004	17	19	10	9	-	-
2	Program dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Yang Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelambagaan TA 2007 dan 2008	11	19	17	2	-	-
3	Laporan Keuangan TA 2008	8	9	8	1	-	-
4	Laporan Keuangan TA 2010	8	14	10	4	-	-
5	Pengelolaan Pertanggungjawaban RN Tahun 2009 & 2010	13	16	9	7	-	-
6	Laporan Keuangan TA 2011	20	38	26	12	-	-
7	Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Negara Tahun 2011 & 2012	12	23	14	9	-	-
8	Laporan Keuangan TA 2012	14	25	18	8	-	-
9	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Ravlu LK oleh Aparat Pengawasan Internal Penerimaan (APIP) pada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta	12	21	-	-	21	-
10	Laporan Keuangan TA 2013	10	40	27	13	-	-
11	Laporan Keuangan TA 2014	14	34	26	8	-	-
12	Laporan Keuangan TA 2015	15	41	23	12	8	-
13	Laporan Keuangan TA 2016	8	18	3	11	4	-
14	Laporan Keuangan TA 2017	9	16	10	3	3	-
Jumlah Pemantauan TLHP		178	336	201	90	36	-

Keterangan:

- SR : Sesuai Rekomendasi
BS : Belum Sesuai
BD : Belum Ditindaklanjuti
TDD : Tidak Dapat Ditindaklanjuti

18. Dokumentasi Data Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Aplikasi SIRUP

The screenshot displays the SIRUP (Sistem Informasi Rantai Pasok) application interface. The main window shows a document titled "PENGADAAN PROFESSIONAL CONFERENCE ORGANIZER (PCO) UNTUK PENYELENGGAAN THE THIRD WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT". The document is a Request for Proposal (RFP) issued by the Ministry of National Development Planning (KEMENDIKUMHUKUM) to procure services for organizing a professional conference organizer (PCO) for the Third World Parliamentary Forum on Sustainable Development. The document includes details such as the procurement type (Pembelian Jasa), the estimated value (Rp. 1.000.000.000,00), and the deadline for submission (November 2019). The interface also shows a sidebar with navigation options and a top bar with the SIRUP logo and user information.